



PRAKTIK CERDAS DARI
KOTA MAKASSAR

MAKASSAR, MENGELOLA LIMBAH BERBUAH SANIPURA

Visi pemerintahan Kota Makassar sebagaimana diusung Walikota Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto adalah mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang nyaman untuk semua. Visi ini dijabarkan ke dalam 3 misi yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat, penataan birokrasi dan pelayanan publik, serta penataan kota. Saat ini, jika kita ke Makassar maka kita akan dengan mudah melihat atau membaca simbol atau akronim yang merefleksikan sejumlah program dan inovasi. Sebutlah Makassar Tidak Rantasa, Sombere dan Smart City, Aparong,

Home Care hingga Telemedicine.

Dengan wilayah seluas 175 km² dan berpenduduk tidak kurang 1,8 juta, Pemerintah Kota Makassar dituntut untuk berinovasi dalam mengelola pernik sosial, ekonomi dan lingkungannya, salah satunya isu sampah. Tiga tahun terakhir, Pemerintah Kota Makassar mengembangkan apa yang disebut 'Sanitasi Komunal'. Program tersebut adalah penjabaran program Pemerintah Indonesia melalui Rencana Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019 yang mengamanatkan bahwa pada 2019 Indonesia akan mencapai 100 persen akses air minum dan sanitasi (*Universal Access 2019*).



Untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah Kota Makassar melalui Tim Pokja AMPL yang terdiri dari Bappeda, Dinas PU, Badan Lingkungan Hidup Daerah, dan Dinas Kesehatan telah kompak bersama mengembangkan program sanitasi perkotaan berbasis masyarakat dengan membangun pengelolaan limbah rumah tangga dengan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) secara komunal. Beberapa lokasi lokasi yang telah memiliki pengelolaan limbah komunal di antaranya adalah Kelurahan Bulurokeng, Biringkanayya, Rappokalling, Tallo dan Tamalate.

IPAL KOMUNAL

IPAL atau Instalasi Pengolahan Air Limbah adalah sarana pengolahan limbah cair, bisa dari WC, dari air cuci dan kamar mandi. Ipal digunakan bersama-sama atau komunal sebagai sebuah terobosan program. Komponennya terdiri dari unit pengolah limbah, jaringan perpipaan meliputi bak

Makassar merupakan kota pertama yang menyiapkan regulasi terkait dengan Ipal komunal dan sudah pernah menerima penghargaan Sanipura. Akan tetapi, hasil yang dapat terlihat dalam pembangunan sanitasi ini tidak dapat langsung terlihat

kontrol dan lubang perawatan dan sambungan rumah tangga. Selain itu ada unit pengolah limbah yang terletak jauh dari lokasi warga. 1 unit Ipal komunal dapat digunakan bersama oleh 5 hingga 200 rumah.

Ipal dapat mengontrol atau memperbaiki kualitas air karena limbah tidak lagi dibuang sembarangan. Bakteri *E.Colli* yang menyebabkan penyakit perut seperti *typhus*, *diare*, *kolera* dapat dicegah. Pada



aspek lingkungan, dengan adanya Ipal maka kita dapat mencegah masuknya benda kimia ke dalam tanah seperti kimia deterjen yang dapat mempengaruhi keasaman/pH tanah. Limbah berbau kimia yang dibuang ke sungai berdampak pada kematian tumbuhan dan hewan tertentu di sungai, untuk jangka panjang dapat merusak ekosistem. Dari sisi estetika, dengan adanya Ipal kita bisa mencegah adanya masalah atau pemandangan tidak sedap dan merusak estetika.

Dari sisi perencanaan, apa yang dilakukan oleh Pemkot Makassar ini telah berjalan selama 10 tahun terakhir namun baru digalakkan secara intensif sejak tahun 2010. Pokja AMPL sudah ada sejak tahun 2008 dan telah terbentuk Pokja sanitasi di 85 kelurahan. Sedangkan badan swadaya masyarakat untuk BKM yang selama ini menangani pembangunan dan infrastruktur di tingkat kelurahan telah diperkenalkan tentang tata cara pembuangan limbah.

Untuk memastikan keberlanjutan

pengelolaan sampah atau limbah kota, hal yang perlu dilakukan adalah pembinaan dengan mengajak Pokja AMPL untuk ikut turun ke kelurahan. Selain itu, Pemerintah Kota Makassar juga seharusnya memiliki tim promosi sanitasi. Sedangkan di tingkat teknis, ada UPTD pengelolaan limbah yang bertugas untuk membina dan mendampingi pasca konstruksi.

Makassar merupakan kota pertama yang menyiapkan regulasi terkait dengan Ipal komunal dan sudah pernah menerima penghargaan Sanipura. Akan tetapi, hasil yang dapat terlihat dalam pembangunan sanitasi ini tidak dapat langsung terlihat.

Penghargaan Sanipura yang diraih oleh Kota Makassar diperoleh pada tahun 2016 karena kesuksesannya dalam memberikan inovasi berkelanjutan dalam bidang sanitasi. Pemberian penghargaan ini merupakan buah pengelolaan isu sanitasi kota. Disamping makassar, daerah lain yang juga mendapatkan penghargaan tersebut adalah Kota Banda Aceh, Kabupaten Gunung Kidul, Magetan,

Sleman, Bogor, Balikpapan, Muara Enim, Ngawi, dan Kota Surabaya. Penghargaan Sanipura Award diberikan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani beberapa waktu lalu.

Apa yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar terkait tata kelola limbah seperti sebuah pesan untuk kita semua untuk fokus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah atau limbah kota. Capaian Kota Makassar saat memperoleh penghargaan Sanipura

merupakan sinyal kuat bahwa upaya mencapai target universal telah semakin dekat dan nyata. Adalah kewajiban pemerintah bersama masyarakat dalam menjaga semangat, menjamim penyediaan layanan dasar air minum dan sanitasi bagi seluruh warga kota.

Cara Makassar menangani limbah kota sebagaimana disampaikan oleh Imbang di atas seharusnya dapat menjadi inspirasi bagi kita semua terutama kabupaten/kota yang sedang kesulitan menangani sampah di wilayahnya. Tertarik menerapkan Ipal Komunal di daerah Anda? Mari belajar ke Makassar! ■

